"EVALUASI PENERIMAAN PPPK 2022 DALAM UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN GURU HONORER"

DEBORA SANUR LINDAWATY, DEWI SENDHIKASARI DHARMANINGTIAS, ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, POEDJI POERWANTI, NURFADHILAH ARINI

PERMASALAHAN

Permasalahan pemenuhan guru di daerah antara lain: pengajuan kebutuhan formasi dari daerah, dapodik, kemampuan anggaran daerah, proses seleksi yang terpusat, minimnya keterlibatan daerah dalam seleksi PPPK, serta banyaknya peraturan pelaksana yang belum terbentuk.

DATA KEBUTUHAN GURU TAHUN 2022

- Kebutuhan Guru Tahun 2022 mencapai 781.844 dengan tingkat kelulusan seleksi sebanyak 250.432.
- Sisa kebutuhan formasi dari seleksi Tahun 2022 mencapai 531.412.
- Proyeksi Guru ASN yang akan pensiun di Tahun 2024 mencapai 69.762.
- Total kebutuhan Guru Tahun 2023 mencapai 601. 174.

ANGGARAN DAERAH

Skema pembayaran PPPK guru memberatkan daerah. Hal ini menjadi pertimbangan bagi daerah dalam mengajukan formasi PPPK guru.

CELAH REGULASI

- Beberapa regulasi terkait PPPK yang belum dibentuk dan diperlukan antara lain terkait kewenangan dapodik, mutasi, cuti, gaji tunjangan, disiplin, perpanjangan dan pemberhentian PPPK, penilaian kinerja, seragam, serta guru mata pelajaran yang lebih spesifik seperti guru bahasa dan seni budaya.
- Secara bersamaan, pemenuhan guru bergantung pada rekrutmen secara nasional, sehingga tidak mampu mengatasi karakteristik kebutuhan guru yang bersifat dinamis.

DAPODIK

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi rujukan Kemendikbudristek dalam proses penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, menimbulkan beberapa masalah antara lain: penerimaan dan penempatan yang tidak sesuai, perubahan formasi dan pergeseran nama lulusan, dan lolosnya peserta yang sudah meninggal atau mengundurkan diri.

KETERLIBATAN DAERAH

Proses seleksi yang terpusat menyebabkan minimnya keterlibatan daerah dalam seleksi PPPK Tahun 2022.

Designed by:
PPD - Pusat Penelitian
PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI